

Analisis Efektivitas Pendapatan dan Efisiensi Belanja Pada LRA BPKAD Kota Tidore Kepulauan.

Analysis of Revenue Effectiveness And Spending Efficiency At LRA BPKAD Tidore City

Sorayah Mohammad , David Paul Elia Saerang, Hendrik Gamaliel

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

e-mail.com; sorayahmohammad20@gmail.com, d_saerang@unsrat.ac.id,
hendrik_gamaliel@unsrat.ac.id

Abstrak: (Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa selisih pembiayaan anggaran. Maka dalam hal ini, kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari laporan anggarannya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan, metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumenter, survey dan observasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan mengenai Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), menunjukkan bahwa kinerja pendapatan belum mencapai target namun termasuk dalam kategori efektif hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah yang terealisasi dengan yang dianggarkan. Sedangkan kinerja belanja pemerintah daerah Kota Tidore dinilai kurang efisien karena dinilai boros dan tidak dapat menghemat anggaran yang ada).

Kata kunci: **Laporan Realisasi Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tingkat Efektif Pendapatan dan Efisien Belanja Daerah.**

Abstract: *The Budget Realization Report is a report that presents information on income, spending, transfers, surplus/deficit, financing and the remaining difference in budget financing. In this case, the performance of local governments can be seen from their budget reports. This study aims to determine the extent to which the effective level of realization of regional income and expenditure budgets in the local government of the City of Tidore Islands, the analytical method used is a qualitative descriptive method using data collection techniques, namely documentary techniques, surveys and observations. The results of research conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency for the City of Tidore Islands regarding the Analysis of the Realization Report of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), show that revenue performance has not yet reached the target but is included in the effective category, this can be seen from the smaller amount realized with what was budgeted. Meanwhile, the spending performance of the Tidore City regional government is considered to be inefficient because it is considered wasteful and cannot complicate the existing budget.*

Keywords: **Budget Realization Report, Regional Revenue and Expenditure Budget, Regional Effective Level of Revenue and Expenditure Efficiency.**

PENDAHULUAN

Kinerja pemerintah dapat dipahami sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi atau tingkat pencapaian hasil dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan ukuran sejauh mana proses kegiatan organisasi itu memberikan hasil atau mencapai tujuannya. Salah satu alat yang digunakan manajemen dalam melakukan perencanaan dan pengendalian jangka pendek dalam organisasi adalah anggaran. Anggaran merupakan sebuah alat yang berpengaruh besar terhadap perencanaan suatu daerah maupun pengendalian pada organisasi pemerintah, karena sangat bergantung terhadap jumlah anggaran yang direalisasikan atau diberikan oleh Pemerintah, sehingga mampu memungkinkan pencapaian secara ekonomi, efektivitas dan efisiensi (*value for money*) dari penyelenggaraan pemerintahan, serta tujuan dari masing-masing organisasi atau instansi dapat terlaksanakan.

Siregar (2017:21) berpendapat, anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan

Diterima: 30-08-2023; Disetujui untuk Publikasi: 07-09-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Setiap daerah dituntut untuk mampu mandiri dalam pengelolaan keuangan daerahnya sendiri, berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah yang baik harus dilaksanakan secara akuntabilitas dan transparansi sehingga membantu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Guna mengetahui kinerja dari pemerintah daerah maka diperlukan pengukuran kinerja yang dapat dilakukan dengan mengukur kinerja pemerintah daerah tersebut. Pengukuran kinerja yang menjadi acuan yaitu kinerja dari laporan keuangannya. Dari laporan keuangan tersebut dapat melihat apakah penyerapan anggaran berjalan secara efektif dan efisien atau tidak. Laporan keuangan merupakan salah satu dokumen penting dalam berbagai sektor termasuk sektor pelayanan publik seperti pemerintahan. Berhasil atau tidaknya kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah yang juga dapat dijadikan sebagai dasar pertanggungjawabannya terhadap publik.

Laporan Realisasi Anggaran menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode. Realisasi anggaran tersebut harus dinilai efektivitas dan efisiensinya untuk mengetahui penyerapan anggaran suatu dinas atau pemerintah daerah.

“Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik” (Renyowijoyo, 2012). Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik. Wilayah publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kelompok dibandingkan dengan sektor swasta/komersial. Secara kelembagaan wilayah publik antara lain meliputi organisasi laba non pemerintahan dan organisasi non laba non pemerintahan.

Value For Money merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. Tuntutan baru (transparansi dan akuntabilitas) dalam organisasi sektor publik harus memperhatikan *value for money* (VFM) dalam menjalankan aktivitasnya. VFM adalah indikator pengukuran kinerja dalam sektor publik yang memberikan informasi apakah dana yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya.

Menurut Chalit (2022), APBD adalah suatu bentuk nyata rancangan kerja keuangan yang komprehensif serta menghubungkan dengan pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Dalam satu tahun anggaran, APBD adalah uang yang berguna untuk mencapai tujuan daerah dalam masa waktu tertentu pada anggaran satu tahun. Menurut Widjajanta, Widyarningsih, dan Tanuatmodjo (2014:22), dalam bukunya Ekonomi dan akuntansi, “proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), yaitu APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah, penyusunan rancangan APBD berpedoman pada rencana pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Negara. Dalam hal anggaran yang diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturan daerah, sebaliknya, anggaran yang diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah.

Secara umum pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006, Pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak & kewajiban daerah tersebut.

Pengertian laporan keuangan menurut peraturan menteri keuangan, “Laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan”.

Laporan kinerja keuangan atau disebut juga dengan laporan pendapatan dan biaya laporan surplus-rugi, laporan operasi, laporan surplus-defisit, atau laporan profit dan lost adalah laporan keuangan yang

menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu (Bastian, 2006:248). Indikator Kinerja keuangan menurut Bastian (2006:267), adalah “ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*)”.

“Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara sejumlah yang digambarkan dalam APBD di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasikan dalam APBD di akhir periode” (Bastian, 2006:387). Manfaat penyusunan laporan realisasi anggaran menurut Standar Akuntansi Pemerintah (2007:85) yaitu, dalam laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tulangow dan Runtu (2016) Tentang Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian, Pemerintah kabupaten Minahasa belum terlalu baik dalam merealisasikan pendapatan daerahnya. Berbeda dengan belanja daerah, dalam tiga tahun penelitian pemerintah kabupaten Minahasa sudah baik dalam merealisasikan belanja dengan tidak melebihi dengan jumlah yang dianggarkan.

Petra dan Puspitasari (2021) Tentang Analisa Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dari penelitian ini ditemukan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Sumatera Barat khususnya Kota Padang pada tahun 2018 cukup efektif sedangkan untuk tahun 2019 kurang efektif. Hal ini terlihat dari tingkat efektivitas tahun 2018 sebesar 91,51% sedangkan untuk tahun 2019 adalah sebesar 87,29%. Sedangkan untuk tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan belennya pada tahun 2018 kurang efisien dan untuk tahun 2019 cukup efisien.

Elim (2015) Tentang Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kota Kotamobagu. Hasil penelitian, dari hasil perhitungan rasio efisien belanja, maka dapat dilihat T.A 2013-2014 pemerintah kota Kotamobagu dapat melakukan penghemat ananggaran sebesar 12,73%.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti memilih pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.

Tempat pelaksanaan penelitian ini pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2022 sampai dengan selesai.

Jenis Data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu laporan keuangan LRA BPKAD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Sumber Data. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan baik melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak informan. Untuk data sekunder diperoleh itu berupa bukti, catatan atau laporan historis tentang anggaran kegiatan keuangan yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter.

Metode Pengumpulan Data. 1. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan dokumen yang bersumber dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kepulauan Tidore Maluku Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Desember 2018

URAIAN	JUMLAH (Rp)		Selisih	
	Anggaran	Realisasi	Rp	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
PENDAPATAN	867.746.252.506	861.537.337.720	6.208.914.786	99,28
PENDAPATAN ASLI DAERAH	60.096.952.506	57.904.788.671	2.192.163.835	96,35
PENDAPATAN TRANSFER DAN DANA PERIMBANGAN	805.049.300.000	803.632.549.049	1.416.750.951	99,82
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2.600.000.000	0	2.600.000.000	0
BELANJA	799.807.244.050	762.092.301.940	37.714.942.110	95,28
BELANJA OPERASI	617.250.534.083	588.438.113.817	28.812.420.266	95,33
BELANJA MODAL	179.056.709.967	173.582.488.123	5.474.221.844	96,94
BELANJA TAK TERDUGA	3.500.000.000	71.700.000	3.428.300.000	2,05
TRANSFER	96.982.815.000	96.982.812.000	3.000	99,99
PEMBIAYAAN	29.043.806.544	29.326.356.961	279.650.423	100,97
PENERIMAAN DAERAH	35.352.808.282	35.634.304.202	281.495.920	100,8
PENGELUARAN DAERAH	6.309.001.738	6.307.947.241	1.854.497	99,98

Sumber: Data Diolah Penulis (2022)

a. Efektif Pendapatan Daerah

Rasio Efektif = $\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100$

Anggaran

Rasio Efektif = $\frac{\text{Rp. 861.537.337.720}}{\text{Rp. 867.746.252.506}} \times 100\%$

Rp. 867.746.252.506

Rasio Efektif = 99,28%

Dari perhitungan rasio efektif pendapatan diatas terlihat bahwa realisasi anggaran ialah lebih kecil daripada target anggaran sehingga tercapai tingkat efektif lebih besar 99,28%.

b. Efisien Belanja Daerah

$$\text{Rasio Efisien Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

$$1) \text{ Efisien Belanja} = \frac{\text{Rp. 762.092.301.940}}{\text{Rp. 799.807.244.050}} \times 100\%$$

$$\text{Efisien Belanja} = 95,28\%$$

$$2) \text{ Belanja Operasi} = \frac{\text{Rp. 588.438.113.817}}{\text{Rp. 617.250.534.083}} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Operasi} = 95,33$$

$$3) \text{ Belanja Modal} = \frac{\text{Rp. 173.582.488.123}}{\text{Rp. 179.056.709.967}} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Modal} = 96,94 \%$$

$$4) \text{ Belanja Tak Terduga} = \frac{\text{Rp. 71.700.000}}{\text{Rp. 3.500.000.000}} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Tak Terduga} = 2,05 \%$$

$$5) \text{ Transfer} = \frac{\text{Rp. 96.982.812.000}}{\text{Rp. 96.982.815.000}} \times 100\%$$

$$\text{Transfer} = 99,99 \%$$

$$6) \text{ Pembiayaan} = \frac{\text{Rp. 29.326.356.961}}{\text{Rp. 29.043.806.544}} \times 100\%$$

$$\text{Pembiayaan} = 100,97 \%$$

$$7) \text{ Pengeluaran Daerah} = \frac{\text{Rp. 6.307.947.241}}{\text{Rp. 6.309.001.738}} \times 100\%$$

$$\text{Pengeluaran Daerah} = 99,98\%$$

$$8) \text{ Penerimaan Daerah} = \frac{\text{Rp. 35.634.304.202}}{\text{Rp. 35.352.808.282}} \times 100\%$$

$$\text{Penerimaan Daerah} = 100,80 \%$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisien diatas menunjukkan bahwa pemerintah kota Tidore Kepulauan telah mengefisienkan pengeluaran pada anggaran belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi , belanja modal, belanja tak terduga , transfer, pembiayaan, penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang masing-masing memiliki rasio efisien sebesar 95,28%, 95,33%, 96,94%, 2,05%, 99,99%, 100,97%, 99,98%, 100,80.

Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019

URAIAN	JUMLAH (Rp)		Selisih	
	Anggaran	Realisasi	Rp	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
PENDAPATAN	919.020.980.586	914.186.293.107	4.834.687.479	99,47

URAIAN	JUMLAH (Rp)		Selisih	
	Anggaran	Realisasi	Rp	%
1	2	3	4	5
PENDAPATAN ASLI DAERAH	62.669.911.660	67.775.406.786	5.105.495.126	108,15
PENDAPATAN TRANSFER DAN DANA PERIMBANGAN	843.575.122.926	833.664.940.321	9.910.182.605	98,83
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	12.775.946.000	12.745.946.000	30.000.000	99,77
BELANJA	839.284.519.027	799.164.134.606	40.120.384.421	95,22
BELANJA OPERASI	621.136.568.653	601.321.038.637	19.815.530.016	91,38
BELANJA MODAL	215.147.950.374	196.597.221.969	Rp18.550.728.405	91,38
BELANJA TAK TERDUGA	3.000.000.000	1.245.874.000	Rp1.754.126.000	41,53
TRANSFER	104.025.042.300	103.844.874.288	180.168.012	99,83
PEMBIAYAAN	24.288.580.741	24.287.967.971	0	
PENERIMAAN DAERAH	31.788.580.741	31.787.967.971	612.770	99,99
PENGELUARAN DAERAH	7.500.000.000	7.500.000.000	-	100

Sumber: Data Diolah Penulis (2022)

a. Efektif Pendapatan Daerah

$$1) \text{ Rasio Efektif} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100$$

$$2) \text{ Rasio Efektif} = \frac{\text{Rp. 914.186.293.107}}{\text{Rp. 919.020.980.586}} \times 100\%$$

$$3) \text{ Rasio Efektif} = 99,47 \%$$

Dari perhitungan rasio efektif pendapatan diatas terlihat bahwa realisasi anggaran ialah lebih kecil daripada target anggaran sehingga tercapai tingkat efektif lebih besar 99,47%.

b. Efisien Belanja Daerah

$$1) \text{ Rasio Efisien Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

$$2) \text{ Efisien Belanja} = \frac{\text{Rp. 799.164.134.606}}{\text{Rp. 799.164.134.606}} \times 100\%$$

- Rp. 839.284.519.027
- Efisien Belanja = 95,22%
- 3) Belanja Operasi = $\frac{\text{Rp. 601.321.038.637}}{\text{Rp. 621.136.568.653}} \times 100\%$
- Belanja Operasi = 96,81%
- 4) Belanja Modal = $\frac{\text{Rp. 196.597.221.969}}{\text{Rp. 215.147.950.374}} \times 100\%$
- Belanja Modal = 91,38 %
- 5) Belanja Tak Terduga = $\frac{\text{Rp. 1.245.874.000}}{\text{Rp. 3.000.000.000}} \times 100\%$
- Belanja Tak Terduga = 41,53 %
- 6) Transfer = $\frac{\text{Rp. 103.844.874.288}}{\text{Rp. 104.025.042.300}} \times 100\%$
- Transfer = 99,83%
- 7) Pembiayaan = $\frac{\text{Rp. 24.287.967.971}}{\text{Rp. 24.288.580.741}} \times 100\%$
- Pembiayaan = 100,00 %
- 8) Pengeluaran Daerah = $\frac{\text{Rp. 7.500.000.000}}{\text{Rp. 7.500.000.000}} \times 100\%$
- Pengeluaran Daerah = 100,00%
- 9) Penerimaan Daerah = $\frac{\text{Rp. 31.787.967.971}}{\text{Rp. 31.788.580.741}} \times 100\%$
- Penerimaan Daerah = 99,99%

Berdasarkan perhitungan rasio efisien diatas menunjukkan bahwa pemerintah kota Tidore Kepulauan telah mengefisienkan pengeluaran pada anggaran belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi , belanja modal, belanja tak terduga , transfer, pembiayaan, penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang masing-masing memiliki rasio efisien sebesar 95,22%, 96,81%, 91,38%, 41,53%, 99,33%, 100,00%, 100,00%, 99,99%

Tabel 3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Desember 2020

URAIAN	JUMLAH (Rp)		Selisih	
	Anggaran	Realisasi	Rp	%
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
PENDAPATAN	874.080.209.104	906.027.787.630	31.947.578.526	103,63
PENDAPATAN ASLI DAERAH	69.345.279.187	81.508.249.263	12.162.970.076	117,54
PENDAPATAN TRANSFER DAN DANA PERIMBANGAN	787.408.329.917	808.298.106.938	20.889.777.021	102,65
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	17.326.600.000	16.221.431.429	1.105.168.571	93,62

URAIAN	JUMLAH (Rp)		Selisih	
	Anggaran	Realisasi	Rp	%
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
BELANJA	814.974.790.353	743.341.490.700	71.633.299.653	91,21
BELANJA OPERASI	593.762.667.193	556.451.135.646	37.311.531.547	93,72
BELANJA MODAL	160.229.519.161	154.516.958.292	5.712.560.869	96,43
BELANJA TAK TERDUGA	60.982.603.999	32.373.396.762	28.609.207.237	53,09
TRANSFER	77.031.633.300	77.031.633.281	19	100
PEMBIAYAAN	17.926.214.549	28.991.326.910	9.059.882.921	161,73
PENERIMAAN DAERAH	25.433.729.718	35.496.227.359	10.062.497.641	139,56
PENGELUARAN DAERAH	7.507.515.169	6.504.900.449	1.002.614.720	86,65

Sumber: Data Diolah Penulis (2022)

a. Efektif Pendapatan Daerah

$$1) \text{ Rasio Efektif} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100$$

$$\text{Rasio Efektif} = \frac{\text{Rp. 906.027.787.630}}{\text{Rp. 874.080.209.104}} \times 100\%$$

$$\text{Rp. 874.080.209.104}$$

$$\text{Rasio Efektif} = 103,65 \%$$

Dari perhitungan rasio efektif pendapatan diatas terlihat bahwa realisasi anggaran ialah lebih kecil daripada target anggaran sehingga tercapai tingkat efektif lebih besar 99%

b. Efisien Belanja Daerah

$$1) \text{ Rasio Efisien Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

$$2) \text{ Efisien Belanja} = \frac{\text{Rp. 743.341.490.700}}{\text{Rp. 814.974.790.353}} \times 100\%$$

$$\text{Efisien Belanja} = 91,21 \%$$

$$3) \text{ Belanja Operasi} = \frac{\text{Rp. 556.451.135.646}}{\text{Rp. 593.762.667.193}} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Operasi} = 93,72$$

- 4) Belanja Modal = $\frac{\text{Rp. } 154.516.958.292}{\text{Rp. } 160.229.519.161} \times 100\%$
 Belanja Modal = 96,43 %
- 5) Belanja Tak Terduga = $\frac{\text{Rp. } 32.373.396.762}{\text{Rp. } 60.982.603.999} \times 100\%$
 Belanja Tak Terduga = 53,09
- 6) Transfer = $\frac{\text{Rp. } 77.031.633.281}{\text{Rp. } 77.031.633.300} \times 100\%$
 Transfer = 100,00%
- 7) Pembiayaan = $\frac{\text{Rp. } 28.991.326.910}{\text{Rp. } 17.926.214.549} \times 100\%$
 Pembiayaan = 161,73 %
- 8) Pengeluaran Daerah = $\frac{\text{Rp. } 6.504.900.449}{\text{Rp. } 7.507.515.169} \times 100\%$
 Pengeluaran Daerah = 86,65%
- 9) Penerimaan Daerah = $\frac{\text{Rp. } 35.496.227.359}{\text{Rp. } 25.433.729.718} \times 100\%$
 Penerimaan Daerah = 139,56 %

Berdasarkan perhitungan rasio efisien diatas menunjukkan bahwa pemerintah kota Tidore Kepulauan telah mengefisienkan pengeluaran pada anggaran belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi , belanja modal, belanja tak terduga , transfer, pembiayaan, penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang masing-masing memiliki rasio efisien sebesar 91,21%, 93,72%, 96,43%, 53,09%, 100,00%, 161,73%, 86,65%, 139,56

4.2 Pembahasan

Anggaran berisi rencana kegiatan yang dipersentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas.

Jika anggaran pendapatan lebih kecil daripada realisasinya maka anggaran tersebut efektif sedangkan jika anggaran pendapatan lebih besar maka anggaran tersebut cukup efektif atau bahkan tidak efektif. Efektif anggaran belanja berbanding terbalik dengan anggaran pendapatan yaitu jika anggaran belanja lebih besar dari pada realisasinya maka anggaran tersebut Efisien, sedangkan jika anggaran belanja lebih kecil daripada realisasinya maka anggaran tersebut tidak efisien.

A. Rasio Efektif

Berdasarkan hasil penelitian rasio efektif anggaran pendapatan pada pemerintah daerah Kota Tidore pada tahun 2018-2020 dinilai sudah efektif dalam mengelola anggaran pendapatan yaitu sebesar 99,28%, 99,47% dan 103,65%. Tingkat efektif yang paling tinggi tercapai pada T.A 2020 yaitu dengan persentase sebesar 103,65%

B. Rasio Efisien

Hasil penelitian rasio efisien belanja pada pemerintah daerah Kota Tidore dinilai kurang efisien karena

pemerintah daerah Kota Tidore tidak mampu mengelola anggaran secara hemat untuk tahun anggaran 2018-2020 hal ini ditunjukkan dengan realisasi anggaran belanja kota Tidore yang tidak terdapat angka melebihi namun menghampiri anggaran belanja. Rasio efisien dalam penggunaan anggaran belanja T.A 2018, 2019 dan 2020 yaitu sebesar 95,79%; 95,73%; dan 92,72%.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dilihat dari uraian terdahulu, maka dapat disimpulkan jika pendapatan lebih tinggi daripada realisasi pendapatan maka menghasilkan selisih bertambah. Semakin besar tingkat realisasi pendapatan dibanding dengan target yang dianggarkan, maka semakin tinggi tingkat efektifnya, sedangkan anggaran belanja berbanding terbalik dengan anggaran pendapatan. Jika anggaran belanja lebih besar daripada realisasi maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah mampu mengefisienkan belanjanya, dari itu maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tingkat efektif pendapatan dari pemerintah kota Tidore Kepulauan T.A 2018-2019 belum mencapai target namun sudah mencapai kategori efektif karena berada pada predikat 90%-100% , hal ini dapat dilihat dari lebih kecilnya jumlah realisasi anggaran pendapatan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditargetkan pada tahun anggaran 2018-2019 yaitu sebesar 99,28% dan 99,47%. Namun tingkat efektif pendapatan pada tahun 2020 sudah mencapai target bahkan telah melebihi target yang dianggarkan sehingga dinilai sangat efektif yaitu dengan presentase 103,65%.
2. Tingkat efisien belanja Laporan Realisasi Anggaran pada BPKAD pemerintah kota Tidore Kepulauan dinilai kurang efisien, hal ini dilihat dari presentase realisasi belanja diatas 90% dari tahun anggaran 2018-2020. Walaupun tidak adanya angka yang melebihi anggaran belanja pada periode tahun 2018-2020, namun tetap dinilai kurang efisien. Presentase nilai 95,28% , 95,22% , 91,21%.

Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2, Jakarta : Salemba Empat
- Chalit. 2020. *Pengertian APBD : Fungsi, Dasar Hukum, dan Langkah Penyusunan* . Article , ruangmenyala.id
- Petra, B.A ., & Sari Y.P (2021). Analisa Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatra Barat. *Jurnal ekobistek*
- Renyowijoyo, Muindro. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*, Edisi 3. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Siregar, Baldric. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Tulangow, A.P., T. Runtu. 2016. *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa*. Jurnal EMBA. Vol.4 No.3
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Widjajanta, B., Widyarningsih, A., & Tanuatmodjo, H. (2014). *Ekonomi dan Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi 20-22* CV Citra Praya